

MENGANALISIS JURNAL PENEGAK HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA

Mata Kuliah : MKU PKN
Program Studi : S1 PGSD
Semester/Kelas : 2/F
Dosen Pengampu : 1. Roy Kembar Habibi M.Pd



Disusun Oleh:

Qonita Mardhia Suhendro (2413053193)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG 2025**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian merupakan tantangan yang kompleks bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa tindak pidana perjudian memiliki karakteristik yang tersembunyi dan kerap kali dilindungi oleh jaringan yang luas, termasuk oknum aparat sendiri. Hal ini menyebabkan upaya pemberantasan perjudian tidak hanya memerlukan kekuatan hukum, tetapi juga integritas dan keberanian dari aparat penegak hukum.

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki peran penting dalam menanggulangi perjudian. Mereka tidak hanya bertugas menindak secara langsung para pelaku, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan menjaga ketertiban masyarakat agar tidak terganggu oleh praktik perjudian. Artikel ini menyoroti bahwa aparat kepolisian kerap menghadapi hambatan baik dari dalam institusi sendiri maupun dari luar, seperti tekanan dari tokoh masyarakat atau pengaruh kekuasaan.

Upaya penegakan hukum terhadap perjudian memerlukan strategi yang menyeluruh. Dalam artikel disebutkan bahwa tindakan represif saja tidak cukup, melainkan harus diiringi dengan pendekatan preventif dan preemtif. Misalnya, peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, kerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat, serta memperkuat pengawasan internal terhadap aparat kepolisian itu sendiri agar tidak terlibat dalam praktik perjudian.

Dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali terbentur oleh kendala teknis dan non-teknis. Secara teknis, misalnya kurangnya sarana dan prasarana untuk membongkar jaringan perjudian yang kompleks. Sementara kendala non-teknis mencakup sikap permisif masyarakat terhadap perjudian atau adanya “main mata” antara pelaku dengan oknum aparat. Artikel ini menyarankan agar kepolisian dapat membangun kerja sama lintas sektor guna menanggulangi masalah ini secara efektif.

Kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian bukan hanya soal menangkap dan menghukum pelaku, tetapi juga membenahi sistem dan mentalitas aparat penegak hukum. Diperlukan keberanian, integritas, serta kerja sama antar instansi agar upaya pemberantasan perjudian benar-benar efektif dan tidak menjadi formalitas semata.

Lebih dari itu, video ini juga memberi pesan bahwa peran pendidikan sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum sejak dini. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus menjadi lingkungan yang menanamkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab hukum. Generasi muda harus dididik untuk berani menyuarakan kebenaran, menolak praktik ketidakadilan, dan mampu menjadi agen perubahan yang membawa semangat supremasi hukum ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam dunia yang semakin kompleks dan global, pemahaman tentang hukum tidak bisa lagi dianggap remeh, melainkan harus menjadi bagian dari identitas warga negara yang cerdas dan berintegritas.

Secara keseluruhan, video “Supremasi Hukum Bagian 2” dari GCED ISOLAedu tidak hanya memberikan pemahaman konseptual tentang hukum, tetapi juga mengajak kita untuk

merefleksikan realitas penegakan hukum di Indonesia serta mendorong perubahan sikap dan perilaku agar hukum benar-benar menjadi pilar utama dalam kehidupan bernegara. Video ini sangat relevan untuk dijadikan bahan pembelajaran, diskusi, dan penguatan nilai-nilai kewarganegaraan yang berbasis pada Pancasila dan konstitusi. Dengan menumbuhkan kesadaran hukum yang kuat, diharapkan masyarakat Indonesia akan semakin matang dalam berpolitik, berorganisasi, dan berinteraksi sosial secara adil dan bertanggung jawab.